POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN KE DEPAN

Oleh: Triyono*

A. SEKILAS TENTANG KABUPATEN KLATEN

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 655,56 km². Pada tahun 2014 jumlah penduduk kabupaten Klaten sebanyak 1.468.414 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,45% per tahun (penduduk tahun 2005 ada 1.298.935 jiwa; BPS Klaten, 2005). Secara administrasi pemerintahan, kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi ke dalam 401 desa/kelurahan.

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, sebanyak 122.384 orang (8,33%) merupakan penduduk berusia 7-12 tahun; 61.791 orang (4,21%) penduduk berusia 13-15 tahun; dan 59.124 orang (4,03%) penduduk berusia 16-18 tahun.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klaten 2010-2015 disebutkan visi pembangunan kabupaten Klaten adalah "*Terwujudnya Klaten yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo*" dengan salah satu misinya "Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yakni: *wareg, waras, wasis, wisma, dan wutuh*". Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Klaten memiliki komitmen yang kuat untuk menyejahterakan masyarakat; baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, perumahan, maupun dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

B. PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Untuk bisa melakukan refleksi terhadap hasil-hasil pembangunan bidang pendidikan di kabupaten Klaten, perlu dipahami sejumlah dokumen yang dijadikan landasan khususnya yang terkait dengan bidang pendidikan. Sejumlah dokumen penting tersebut adalah sbb.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Tanggal 10 Desember 1948 PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 217 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal-2 dokumen ini menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal-usul kebangsaan*

---

* Prof. Dr. Triyono, M.Pd adalah dosen Universitas Widya Dharma Klaten

dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya". Selanjutnya pasal-26 berbunyi "Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan".

Indonesia juga telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Majelis Umum PBB dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979 telah menetapkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Istilah "*diskriminasi terhadap perempuan*" dalam konvensi itu didefinisikan sebagai "*pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berakibat atau bertujuan mengurangi atau menghapuskan: pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil ataupun lainnya oleh kaum perempuan; terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan*".

Negara Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, negara tidak dibenarkan membatasi atau membedakan antara laki-laki dan perempuan baik dalam memperoleh maupun menikmati pendidikan yang ada.

3. Kesepakatan Dakar Tahun 2000

Konferensi Dunia tentang Pendidikan yang dilaksanakan di Dakar (Sinegal) pada bulan April 2000 telah menghasilkan "**Kesepakatan Dakar**" yang berslogan "Pendidikan Untuk Semua = *Education For All*". Isi kesepakatan tersebut adalah (1) menjamin bahwa tahun 2015 semua anak khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk etnik minoritas mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik; (2) mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa pada tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa; dan (3) menghapus disparitas gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan pencapaian

kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian akses anak perempuan terhadap pendidikan dasar yang berkualitas.

Negara Indonesia yang hadir dan turut menanda tangani dokumen Kesepakatan Dakkar mempunyai beban, tanggung jawab, dan kewajiban untuk melaksanakan isi kesepakatan-kesepakatan tersebut melalui penyelenggaraan pendidikan yang adil, merata, dan tidak membedakan peserta didik atas dasar jenis kelamin atau tempat tinggal.

4. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002 menjadi lima ayat yang berbunyi (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari pasal 31 UUD 1945 tersebut menjadi jelas bahwa **setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah yang membiayainya.**

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Pasal 5 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Dan pasal 11 ayat (1) juga tertulis "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun".

Pasal 49 ayat (1) berbunyi bahwa "**Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**".

Makna yang terkandung dalam pasal-pasal di atas bahwa semua warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib bersekolah dan pemerintah harus menjamin kecukupan dana untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun itu. Meskipun secara jelas telah dinyatakan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 mengenai besarnya alokasi dana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah melalui APBN maupun APBD minimal 20%, akan tetapi sampai tahun 2006 ini hal itu belum menjadi kenyataan.

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun lembaga pemerintah/ non pemerintah, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, Inpres tersebut memiliki arti bahwa dalam menyusun rencana, melaksanakan, dan memantau semua kebijakan program pendidikan harus merespon kebutuhan dan kepentingan laki-laki maupun perempuan; baik dalam hal memperoleh akses, partisipasi, melakukan kontrol, maupun memperoleh manfaat dari hasil pembangunan bidang pendidikan.

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 telah diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun lembaga pemerintah/ non pemerintah, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota untuk melakukan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Sejumlah dokumen penting yang disebut di atas merupakan landasan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan yang merata bagi semua warga negara, tanpa membedakan: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, tempat tinggal, asal-usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.

Meskipun proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di kabupaten Klaten tidak (pernah) membedakan jenis kelamin dan asal-usul dan atribut lainnya, ternyata dalam kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang 'berbeda'. Hal ini bisa kita cermati dari data hasil pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten selama dua tahun sebagai berikut.

C. AKSES DAN PEMERATAAN

Suatu pendidikan dikatakan merata jika setiap dan semua penduduk; tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, tempat tinggal, ras, agama, maupun status sosial-ekonomi, memiliki akses yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam menikmati pendidikan. Indikator akses dan pemerataan pendidikan yang penting mencakup (1) angka partisipasi pendidikan, (2) angka mengulang dan putus sekolah, (3) penduduk usia 5 tahun ke atas yang bersekolah dan tidak sekolah lagi, dan (4) angka buta aksara.

1. Angka Partisipasi

Angka partisipasi pendidikan biasanya dibedakan menjadi tiga 3 jenis, yakni (a) Angka Partisipasi Kasar (APK), (b) Angka Partisipasi Murni (APM), dan (c) Angka Partisipasi Sekolah (APS). APK merupakan ratio antara jumlah peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sebagai contoh, APK SD adalah ratio antara jumlah murid SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah ratio antara jumlah peserta didik -- dengan kelompok usia tertentu-- pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sebagai contoh APM SMP adalah ratio antara jumlah siswa SMP yang berusia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun. APS adalah ratio antara jumlah anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sebagai contoh APS penduduk usia 16-18 tahun adalah proporsi antara jumlah penduduk yang berusia 16-18 tahun yang masih/sedang bersekolah.

Dengan menyimak data pendidikan kabupaten Klaten tahun 2004 dan 2014 dapat disebutkan bahwa APK untuk jenjang PAUD (KB/TK/RA) di kabupaten Klaten tahun 2004 mencapai angka rata-rata 99,4 bagi laki-laki dan 89,7 bagi perempuan. Data tahun 2014 PAUD dibedakan menjadi KB dan TK/RA sehingga terjadi penurunan dengan rata-rata 31,21 untuk laki-laki dan 31,66 untuk perempuan.

Kelompok Bermain (*Play Group*) adalah mereka yang berusia 3-4 tahun, sedangkan untuk TK/RA adalah yang berusia 5 dan 6 tahun. APK jenjang PAUD di kabupaten Klaten tahun 2004 maupun tahun 2014 tampak hampir merata ke semua kecamatan; kecuali Klaten Tengah yang sangat menyolok sekitar 90. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk memasukkan anaknya mengikuti pendidikan PAUD di Klaten cukup besar.

Untuk jenjang SD/MI, rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) di kabupaten Klaten tahun 2004 adalah 106,33 bagi laki-laki dan 95,56 bagi perempuan. APK tingkat SD/MI tahun 2004 yang di atas 100 terdapat di kecamatan-kecamatan Gantiwarno, Wedi, Bayat, Trucuk, Kalikotes, Manisrenggo, Karangnongko, Pedan, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Jatinom, Kemalang, Klaten Tengah, dan Klaten Utara. Hal itu menunjukkan bahwa semua anak usia 7-12 tahun telah bersekolah di SD/MI.

Pada tahun 2014 APK pada jenjang SD/MI justru terjadi penurunan menjadi 92,43 laki-laki dan 91,19 perempuan. APK jenjang SD/MI yang mencapai di atas 100 adalah kecamatan-kecamatan: Wedi, Delanggu, Karangnongko, Klaten Tengah, dan Klaten Utara. APK jenjang SD/MI tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2003 adalah 108,21 bagi laki-laki dan 107,18 bagi perempuan; sedangkan APK secara nasional tahun 2003 adalah 106,04 bagi laki-laki dan 105,58 bagi perempuan (BPS, 2003).

Meskipun data APK jenjang SD/MI kabupaten Klaten yang dipilih berdasarkan tempat tinggal (desa-kota) maupun berdasarkan pengeluaran rumah tangga (20% paling kaya-kaya-menengah-miskin-paling miskin) tidak tersedia, namun karena APK cukup merata di semua kecamatan dan telah mencapai angka di atas 100, patut untuk menduga bahwa penduduk kabupaten Klaten yang berusia 7-12 tahun secara merata telah memiliki akses dan kesempatan yang cukup merata dalam menikmati pendidikan SD/MI; baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan; baik mereka yang bertempat tinggal di perkotaan maupun yang di perdesaan.

Pada jenjang SMP/MTs, rata-rata APK di kabupaten Klaten tahun 2004 adalah 82,27 bagi laki-laki dan 76,29 bagi perempuan. Pada tahun 2014 angka tersebut meningkat menjadi 86,02 bagi laki-laki dan 88,13 bagi perempuan. Untuk provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SMP/MTs tahun 2003 masing-masing 79,92 bagi laki-laki dan 82,37 bagi perempuan (BPS, 2003); sedangkan secara nasional angka tersebut masing-masing 79,92 bagi laki-laki dan 82,37 bagi perempuan.

Jika dilihat dari tempat tinggal mereka, APK jenjang SMP/MTs provinsi Jawa Tengah tahun 2003 adalah 72,89 bagi penduduk perdesaan dan 93,65 bagi penduduk perkotaan. Data ini mengindikasikan bahwa penduduk usia 13-15 tahun yang bertempat tinggal di perkotaan lebih banyak menikmati pendidikan di SMP/MTs daripada penduduk yang tinggal

di perdesaan. Untuk kabupaten Klaten, tidak tersedia data APK jenjang SMP/MTs yang terpilah berdasarkan tempat tinggal sehingga tidak bisa dibandingkan dengan data tingkat provinsi Jawa Tengah/ nasional.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK, rata-rata APK di kabupaten Klaten tahun 2004 sebesar 45,64 bagi laki-laki dan 43,07 bagi perempuan. Angka tersebut meningkat cukup signifikan pada tahun 2014 sehingga menjadi 66,46 bagi laki-laki dan 70,72 bagi perempuan. Secara nasional angka tersebut adalah 51,32 bagi laki-laki dan 50,43 bagi perempuan; sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Tengah adalah 46,86 bagi laki-laki dan 46,99 bagi perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun tabel yang memuat APK menurut jenjang pendidikan antara kabupaten Klaten, tingkat provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional sebagai berikut.

Tabel-1. APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten (2004), Provinsi Jawa Tengah (2003), dan Nasional (2003)

No.	Jenjang Pendidikan	Kab. Klaten	Prov. Jateng	Nasional
1	SD + MI			
	Laki-laki	106,33	108,21	106,04
	Perempuan	95,56	107,18	105,59
	Laki-laki + Perempuan	???	107,70	105,82
2	SMP + MTs			
	Laki-laki	82,27	82,05	79,92
	Perempuan	76,29	86,93	82,37
	Laki-laki + Perempuan	???	84,37	81,09
3	SMA + MA + SMK			
	Laki-laki	45,64	46,86	51,32
	Perempuan	43,07	46,99	50,43
	Laki-laki + Perempuan	???	46,93	50,93

Sumber: BPS, 2003; BPS Provinsi, 2004; Dinas P dan K Kab. Klaten, 2004

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel-1 dapat disimpulkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP), APK kabupaten Klaten baik bagi penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan hampir sama dengan APK provinsi maupun nasional; hanya saja APK Kabupaten Klaten bagi penduduk perempuan lebih rendah dari APK tingkat provinsi Jawa Tengah maupun APK nasional.

Untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, MA, SMK), APK kabupaten Klaten masih di bawah APK provinsi Jawa Tengah; sedangkan APK provinsi Jawa Tengah juga lebih rendah dari APK tingkat nasional; baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Di samping itu, data pendidikan pada tingkat provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional juga dipilah berdasarkan jenis kelamin (L, P, L+P) dan tempat tinggal (D, K, D+K); sedangkan data pendidikan kabupaten Klaten belum semuanya dipilah berdasarkan gender dan tempat tinggal, sehingga kita tidak bisa membandingkan.

Jika dicermati data APK jenjang SM tahun 2014, tampak bahwa Kecamatan Kalikotes merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki APK 0,00. Hal itu menunjukkan bahwa di kecamatan Kalikotes tidak terdapat sekolah menengah. Sebaliknya dijumpai pula APK pendidikan menengah bagi siswa laki-laki untuk beberapa kecamatan di atas 100 yaitu kecamatan Ngawen, kecamatan Ceper, kecamatan Jatinom, dan kecamatan Klaten Tengah. Sedangkan kecamatan-kecamatan: Pedan, kecamatan Klaten Selatan, dan kecamatan Klaten Utara memiliki APK di atas 200 bagi siswa perempuan.

Dari angka-angka itu memberikan isyarat bahwa ada kecamatan-kecamatan tertentu 'diserbu' para lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah; karena di kecamatan tempat tinggal mereka belum berdiri SMA/ MA/ SMK. Dengan demikian, pendidikan menengah (SMA/ SMK/ MA) di kabupaten Klaten belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Kalikotes harus mengeluarkan biaya tambahan (seperti: biaya transportasi atau indekost) ketika ingin menyekolahkan anaknya di SMA/ MA/ SMK. Kecamatan Klaten Utara menjadi satu-satunya kecamatan yang "diserbu" oleh lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan pendidikannya.

2. Angka Mengulang dan Putus Sekolah

Angka mengulang (kelas) mengindikasikan banyaknya peserta didik yang belum mencapai standar kompetensi mata pelajaran yang diharapkan, sehingga mereka harus mengulang di kelas yang sama pada tahun pelajaran berikutnya.

Dari tabel pada Lampiran-3 terlihat bahwa rata-rata angka mengulang kelas maupun putus sekolah di kabupaten Klaten untuk jenjang SD/MI tahun 2004 (5,18%) tetapi data tahun 2014 tidak dihitung dalam bentuk persentase akan tetapi jumlahnya sehingga tidak bisa dibandingkan.

Data pada Lampiran-3 juga memperlihatkan bahwa angka putus sekolah (*drop-out*) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) di kabupaten Klaten tahun 2004 relatif rendah; yakni berkisar dari 0,00% sampai 0,34% untuk jenjang SD/MI; dan antara 0,00% sampai dengan 1,90% untuk jenjang SMP/MTs; sedangkan untuk jenjang sekolah menengah angka putus sekolah tertinggi terjadi di kecamatan Manisrenggo (5,08%).

3. Penduduk usia 5 Tahun ke Atas yang Bersekolah/ Tidak Sekolah

Salah satu ketidak merataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan ditunjukkan oleh banyaknya penduduk usia 5 tahun ke atas yang sudah tidak bersekolah lagi. Berikut ini disajikan data persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut tempat tinggal, jenis kelamin, dan partisipasi sekolah.

Tabel-2. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2014

No.	Tingkat	Partisipasi Sekolah			
		Tdk/Blm sek	Masih sekolah	Tdk sekolah	Jumlah
1	NASIONAL				
	Laki-laki	8,5	25,6	65,8	100,0
	Perempuan	13,6	24,0	62,4	100,0
	Laki-laki + Perempuan	11,1	24,8	64,1	100,0
2	JAWA TENGAH				
	Laki-laki	8,3	24,6	67,1	100,0
	Perempuan	15,8	22,7	61,5	100,0
	Laki-laki + Perempuan	12,0	23,7	64,3	100,0
3	KLATEN				
	Laki-laki	9,3	26,3	64,4	100,0
	Perempuan	19,7	21,3	59,1	100,0
	Laki-laki + Perempuan	14,6	23,8	61,7	100,0

Sumber: BPS Jawa Tengah: 2014 (diolah oleh penulis)

Tampak pada tabel bahwa penduduk kabupaten Klaten usia 5 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah baik laki-laki maupun perempuan (14,6%) lebih tinggi dari angka provinsi Jawa Tengah (12,0%) maupun angka nasional (11,1%); sebaliknya persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang sudah tidak bersekolah lagi (61,7%) lebih rendah dari angka provinsi Jawa Tengah (64,3%) maupun angka nasional (64,1%). Hal itu mengindikasikan bahwa angka partisipasi sekolah kabupaten Klaten masih di bawah angka provinsi maupun angka nasional.

4. Angka Buta Aksara

Penduduk buta aksara adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf Latin. Indikator yang biasa digunakan untuk melihat penduduk buta aksara adalah Angka Buta Aksara yakni proporsi jumlah penduduk yang buta aksara terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Angka Buta Aksara merupakan indikator dasar yang mencerminkan taraf

pendidikan penduduk. Makin tinggi Angka Buta Aksara menunjukkan makin rendahnya taraf pendidikan penduduknya; demikian pula sebaliknya. Sebagai bahan perbandingan, berikut ini disajikan tabel angka buta aksara penduduk usia 15-44 tahun kabupaten Klaten (2004), provinsi Jawa Tengah (2003), dan angka secara nasional (2003).

Dari data pada Tabel-3 terlihat bahwa (a) angka buta aksara penduduk perempuan hampir dua kali dari angka buta aksara penduduk laki-laki; baik pada tingkat kabupaten Klaten, tingkat provinsi maupun secara nasional, (b) tingginya angka buta aksara terutama terjadi pada penduduk berusia di atas 44 tahun, dan (c) angka buta aksara penduduk usia 15-44 tahun kabupaten Klaten hampir tiga kali lebih besar dari angka provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Tabel-3. Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15-44 Tahun Kabupaten Klaten (2004), Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional (2003)

No.	Usia 15-44 Tahun	Kab. Klaten	Prov. Jateng	Nasional
1	Usia 15 Tahun +			
	Laki-laki	?	8,71	6,52
	Perempuan	?	19,53	13,84
	Laki-laki + Perempuan	?	14,21	10,21
2	Usia 15-44 Tahun			
	Laki-laki	1,23	1,08	1,32
	Perempuan	4,32	1,05	1,58
	Laki-laki + Perempuan	2,82	1,06	1,45

Sumber: BPS, 2003; Dinas P dan K Kab. Klaten, 2004

Jika kita cermati secara lebih mendalam melalui tabel Lampiran-3, angka buta aksara yang tinggi (di atas 1.000 orang) di kabupaten Klaten dapat dijumpai di kecamatan-kecamatan: Prambanan, Gantiwarno, Cawas, Manisrenggo, Karangdowo, Wonosari, dan Jatinom.

D. MUTU DAN RELEVANSI

Untuk mengetahui tinggi rendahnya mutu pendidikan, biasanya digunakan (1) angka kelulusan, (2) rata-rata nilai ujian (UAS dan UAN), (3) kualifikasi kelayakan guru, dan (4) persentase SMK yang melaksanakan Sistem Ganda (Magang).

1. Angka Kelulusan

Persentase angka kelulusan dianggap sebagai salah satu indikator mutu pendidikan, karena makin tinggi angka kelulusan berarti makin banyak peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi minimal yang diharapkan. Angka kelulusan merupakan proporsi antara jumlah peserta yang lulus terhadap jumlah peserta yang mengikuti ujian.

Berdasarkan data yang dihimpun penulis, angka kelulusan tahun 2004 untuk jenjang SD dan MI sebesar 99,12%. Pada tahun 2005 angka-angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 99,99%. Untuk jenjang SMP/MTS, angka kelulusannya mencapai 99,25% pada tahun 2004 dan menjadi 98,98% pada tahun 2005. Angka kelulusan pada jenjang sekolah menengah tahun 2004 sebesar 99,26% sedangkan tahun 2005 menjadi 95,71%. Ketika standar kelulusan dinaikkan pada tahun 2006, ternyata angka kelulusan pada ujian nasional tingkat SMK di kabupaten Klaten hanya mencapai sekitar 63% saja. Sekitar 1.000 orang peserta telah mengikuti Ujian Paket C dan sekitar 800 orang peserta mengikuti Ujian Paket B di kabupaten Klaten pada akhir bulan Agustus 2006 untuk memperoleh kesetaraan dengan SMP dan SMA. Sebagian terbesar dari peserta ujian kesetaraan tersebut adalah para siswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian nasional tahun 2006. Hal ini memperlihatkan bahwa para siswa kurang memiliki ketahanan yang cukup tangguh untuk menghadapi perubahan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

2. Nilai Ujian Nasional

Rata-rata nilai Ujian Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UAN) dapat pula dianggap sebagai salah satu indikator kualitas pendidikan. Berdasarkan data yang tersaji pada Lampiran-4 rata-rata nilai UAS SD kabupaten Klaten tahun 2004 adalah 6,98 meningkat menjadi 7,33 pada tahun 2005; sedangkan untuk MI sebesar 6,76 tahun 2004 dan tahun 2005 menjadi 7,15. Rata-rata nilai UAS SD tertinggi tahun 2004 diraih oleh kecamatan Klaten Utara (8,96) dan rata-rata nilai UAS SD terendah dari kecamatan Prambanan (6,51); sedangkan untuk tahun 2005 rata-rata nilai UAS SD tertinggi berasal dari kecamatan Klaten Tengah (8,89) dan rata-rata nilai UAS terendah dari kecamatan Cawas (5,93).

Rata-rata nilai UAN SMP tahun 2004 adalah 5,83 meningkat menjadi 6,37 tahun 2005. Rata-rata nilai UAN SMP tertinggi dicapai oleh SMP dari kecamatan Ceper (7,04) dan terendah dari kecamatan Kemalang (5,00). Pada tahun 2005 rata-rata nilai UAN tertinggi dicapai oleh SMP dari kecamatan Klaten Tengah (7,22) dan terendah dari kecamatan Bayat (4,93). Untuk jenjang MTs, rata-rata nilai UAN kabupaten Klaten tahun 2004 berkisar antara 5,49 (kecamatan Karangdowo) sampai dengan 7,19 (kecamatan Kemalang) dengan rata-rata 6,20. Untuk tahun 2005 rata-rata nilai UAN MTs terendah berasal dari kecamatan Wedi

(5,77) dan yang tertinggi berasal dari kecamatan Bayat (7,39). Untuk jenjang SMA, rata-rata nilai UAN yang terendah pada tahun 2004 adalah 5,20 (kecamatan Klaten Tengah) dan yang tertinggi berasal dari SMA di kecamatan Karangnom (7,10). Pada tahun 2005, rata-rata nilai UAN SMA yang tertinggi berasal dari SMA di kecamatan Karangnom (7,67) dan yang terendah berasal dari SMA di kecamatan Karangnongko (5,36). Untuk SMK, rata-rata nilai UAN tertinggi tahun 2004 berasal dari SMK di kecamatan Wonosari (6,56) dan yang terendah berasal dari SMK di kecamatan Manisrenggo (4,66). Untuk tahun 2005, rata-rata nilai UAN SMK yang tertinggi berasal dari SMK di kecamatan Juwiring (7,01) dan yang terendah berasal dari SMK di kecamatan Klaten Tengah (5,01).

Data tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2005, SD yang berasal dari kecamatan Gantiwarno, Wedi, Trucuk, Ngawen, Ceper, Wonosari, Tulung, Jatinom, Klaten Tengah, dan Klaten Utara serta MI yang berasal dari kecamatan Manisrenggo, Ceper, Tulung, dan Klaten Utara mampu mencapai nilai UAS di atas 7,00. Untuk jenjang SMP/MTs, MTs yang berasal dari kecamatan Kemalang mampu mencapai nilai UAN di atas 7,00. Untuk jenjang SMA, rata-rata nilai UAN di atas 7,00 dicapai oleh SMA yang berasal dari kecamatan Karangnom. Dengan demikian SMA yang lokasinya di desa (kecamatan Karangnom) tidak kalah mutunya dibanding dengan SMA-SMA yang ada di kota Klaten.

3. Kualifikasi Guru

Kualitas pendidikan guru diduga turut mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Kelayakan akademik guru dinyatakan 'layak' jika minimal Diploma-II --untuk SD/MI--, minimal Diploma-III --untuk SMP/MTs--, dan minimal Sarjana S-1 atau Diploma-IV --untuk SMA/MA/SMK. Kelayakan akademik guru dinyatakan 'kurang layak' (semi) jika kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh guru satu jenjang dibawah standar yang ditentukan; sedangkan jika lebih rendah dari itu, dinyatakan sebagai 'Tidak Layak'. Dari data yang tersaji pada Lampiran-5 dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pada jenjang SD dan MI guru yang dinyatakan 'layak' mengajar sebanyak 67,37%; 6,96% termasuk kurang layak dan 25,68% lainnya termasuk tidak layak. Persentase tertinggi guru SD dan MI yang tergolong 'kurang dan tidak layak' terdapat di kecamatan Kemalang (53,04%) dan yang terendah terdapat di kecamatan Klaten Utara (19,01%). Untuk jenjang SMP dan MTs, persentase tertinggi guru yang termasuk 'kurang dan tidak layak' terdapat di kecamatan Ngawen (26,83%) dan yang terendah terdapat di kecamatan Karangnongko (11,83%). Pada jenjang sekolah menengah, guru yang bertugas di kecamatan Gantiwarno dan Karangdowo semuanya (100%) telah memenuhi standar kelayakan mengajar;

sedangkan guru SM yang bertugas mengajar di kecamatan Kebonarum yang tergolong 'kurang dan tidak layak' sebesar 41,18%. Terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan bagi guru untuk semua jenjang pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah) sekurang-kurangnya harus berpendidikan Sarjana S-1 atau Diploma-IV, berarti secara bergiliran mereka perlu diberikan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan sampai mencapai jenjang Sarjana atau Diploma-IV.

4. Pendidikan Sistem Ganda di SMK

Indikator pendidikan yang terkait dengan relevansi pendidikan dengan dunia kerja adalah pelaksanaan sistem ganda (*dual system*) melalui program Magang.

Data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten tahun 2005 menunjukkan bahwa sekolah yang telah melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda secara penuh (100% siswa) untuk jurusan Teknik Industri dijumpai di SMK yang berasal dari kecamatan Gantiwarno, Wedi, Manisrenggo, Karangdowo, dan Wonosari. Untuk SMK jurusan Bisnis dan Manajemen yang telah melaksanakan PSG secara penuh adalah SMK yang berasal dari kecamatan Kebonarum. Untuk SMK jurusan Pariwisata baru mampu melaksanakan PSG dengan melibatkan 5% dari jumlah siswa yang ada; dan SMK jurusan Pertanian dan Kehutanan di kecamatan Trucuk baru mampu melaksanakan SPG dengan melibatkan 52,16% dari semua siswanya.

Selain keempat indikator yang disebut di atas, indikator kualitas dan relevansi pendidikan yang cukup penting adalah data tentang (a) prestasi siswa dalam mengikuti lomba baik tingkat daerah, wilayah, nasional, maupun internasional, (b) prestasi guru dalam mengikuti lomba baik pada tingkat kabupaten, provinsi, atau tingkat nasional, (c) prestasi guru dalam menulis buku teks dan buku bacaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran, (d) kesesuaian mata pelajaran yang diajarkan oleh guru dengan latar belakang pendidikan, (e) pengalaman guru dalam mengikuti pelatihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya, dan (f) kualitas buku teks yang digunakan oleh para guru dan peserta didik di setiap jenjang sekolah. Namun sangat disayangkan, penulis tidak mampu mengumpulkan data tersebut.

E. MANAJEMEN

Manajemen pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui hasil dan kinerja pembangunan bidang pendidikan, karena bagaimana pendidikan itu dikelola akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Data tentang manajemen pendidikan antara lain mencakup (a) proporsi pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara laki-laki dengan perempuan, (b) proporsi kepala sekolah, guru, pengawas/ penilik/ pamong, dewan pendidikan, komite sekolah/ madrasah antara yang laki-laki dengan yang perempuan, (c) proporsi siswa laki-laki terhadap perempuan yang menerima beasiswa, (d) proporsi siswa laki-laki terhadap perempuan menurut jurusan di SMK. Akan tetapi tampaknya data tersebut tidak mudah diperoleh mengingat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten belum tersedia data pendidikan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal, sehingga penulis tidak bisa memberikan kajian terhadap hal-hal tersebut.

F. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu dari delapan komponen yang menuntut adanya standar minimal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten, data tentang sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah pada tahun 2005 dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Perpustakaan Sekolah dan Lapangan Olahraga

Untuk jenjang SD dan MI, rata-rata 29,95% SD di kabupaten Klaten telah memiliki perpustakaan sekolah; kecuali SD/MI yang ada di kecamatan Pedan dan Karangdowo tidak satupun SD/MI yang memiliki perpustakaan sekolah; dan 96% SD/MI yang ada di kecamatan Klaten Tengah telah memiliki perpustakaan sekolah.

Untuk jenjang SMP/MTs, rata-rata 84,44% telah memiliki perpustakaan sekolah; kecuali SMP/MTs yang ada di kecamatan Kalikotes (tidak memiliki). Untuk jenjang SMA/MA/SMK, semua telah memiliki perpustakaan sekolah; kecuali SM yang ada di kecamatan Jogonalan.

Tidak satupun SD di kabupaten Klaten telah memiliki lapangan olahraga sendiri. Untuk jenjang SMP/MTs, rata-rata 24,44% telah memiliki lapangan olahraga; tetapi untuk jenjang SM justru tidak satupun yang memiliki lapangan olahraga.

2. Laboratorium, Ruang UKS, dan Ruang BP

Rata-rata 92,59% SMP/MTs di kabupaten Klaten telah memiliki laboratorium untuk menunjang pelaksanaan praktikum bagi siswanya; sedangkan untuk jenjang SMA/SMK, semua sekolah telah memiliki laboratorium. Ruang UKS yang telah ada di SMP/MTs sekitar 69,63%; sedangkan untuk tingkat SMA telah tersedia di semua sekolah. Hampir semua SMP/MTs dan SMA/SMK di kabupaten Klaten telah memiliki ruang BP yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa yang 'bermasalah'. Beberapa SMA juga telah memiliki ruang serba guna yang dapat dimanfaatkan untuk pertemuan-pertemuan dengan para orangtua / wali siswa.

Dan yang lebih penting dari semua yang disebut di atas adalah bagaimana sekolah mampu memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia secara efektif dan efisien untuk kemajuan para siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Klaten.

G. REKOMENDASI

Dengan mencermati beberapa capaian pembangunan pendidikan di kabupaten Klaten selama tahun 2004 dan 2005, beberapa harapan yang dapat disampaikan sebagai rekomendasi untuk para pejabat pengambil keputusan bidang pendidikan di kabupaten Klaten ke depan antara lain:

1. Pendirian unit sekolah baru (SMA/ SMK) di kecamatan Kalikotes perlu memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh. Dengan berdirinya SMA/SMK di Kalikotes sangat berarti karena (a) dapat mengurangi tekanan/ beban kecamatan-kecamatan terdekatnya, (b) mengurangi beban orangtua (masyarakat) baik secara finansial maupun beban psikologis. Tentu saja hal itu membutuhkan studi dan diskusi lanjutan secara cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan benturan-benturan yang bisa berakibat lebih buruk.
2. Data pendidikan yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten seharusnya terpilah menurut (a) jenis kelamin (laki-laki- perempuan), (b) tempat tinggal (kota-desa), dan (c) kelompok pendapatan rumah tangga (tertinggi-tinggi-sedang-rendah-sangat rendah). Dengan demikian akan dapat "membuka mata" kita sebenarnya "siapa" yang menikmati pendidikan lebih baik di kabupaten ini; apakah laki-laki atau

perempuan, apakah mereka yang bertempat tinggal di perkotaan atau di perdesaan dan apakah mereka yang kaya atau termasuk juga penduduk yang miskin.

3. Dalam rangka menjaga keprofesionalan guru sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dialog-dialog akademik di kalangan para guru sebaiknya lebih ditingkatkan; termasuk memotivasi dan menumbuhkembangkan kebiasaan dan budaya menulis karya ilmiah/ melakukan penelitian.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mestinya memprakarsai dan memfasilitasi terbitnya sebuah "Majalah Ilmiah" bidang pendidikan sebagai wahana bagi guru untuk saling berkomunikasi secara ilmiah.
5. Selain kualifikasi dan kompetensi guru, proses perekrutan guru di kabupaten Klaten perlu memperhatikan disesuaikan jurusan dengan kebutuhan setiap mata pelajaran yang masih kurang berdasarkan kenyataan di lapangan.

Hal itu sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa hanya guru-guru profesional saja yang melaksanakan tugas mengajar di sekolah sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dipercepat.

REFERENSI

- Anon. (2002). *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Secara Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten. (2005). *Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007*. Klaten: Bahan Musrenbangda Kabupaten Klaten 2006.
- Badan Pusat Statistik. (2003). *Statistik Pendidikan 2003*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2004. *Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2004*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. (2005). *Klaten dalam Angka 2005*. Klaten: BPS dan Bappeda Kabupaten Klaten.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Pedoman Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten. (2004). *Profil Pendidikan Kabupaten Klaten 2004*. Klaten: Dinas P dan K Kabupaten Klaten, publikasi terbatas.
- _____. (2005). *Profil Pendidikan Kabupaten Klaten 2005*. Klaten: Dinas P dan K Kabupaten Klaten, publikasi terbatas.
- _____. (2006). *Rencana Aksi Daerah Percepatan Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara Kabupaten Klaten*. Klaten: Dinas P dan K Kabupaten Klaten publikasi terbatas.
- Kasim, Ifdhal dan Arus, Johannes dan Masenus. (2001). *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Esai-Esai Pilihan* (Buku-II). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. (2002). *Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (1999). *Lembar Fakta Hak Asasi Manusia: Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM-British Council.